

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka di dapatkan 4 kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. UMP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kab/Kota Provinsi DIY dengan nilai t-Statistik sebesar 0,000442 dan probabilitas sebesar 0,9997
2. Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kab/Kota Provinsi DIY dengan nilai t-Statistik sebesar -2,436938 dan probabilitas sebesar 0,0234.
3. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kab/Kota Provinsi DIY dengan nilai t-Statistik sebesar 2,863078 dan probabilitas sebesar 0,0090.
4. UMP, investasi, dan pengangguran secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kab/Kota Provinsi DIY dengan nilai probabilitas sebesar 0,000000 dan R-square sebesar 0,990699 atau 99%.

5.2. Saran

1. Kepada Pemerintah DIY, berhubungan dengan penentuan kebijakan Upah Minimum Provinsi agar senantiasa mengontrol harga-harga kebutuhan di masyarakat sehingga dapat disesuaikan dengan tingkat upah yang akan diterima oleh pekerja/buruh.
2. Kepada Pemerintah DIY, agar berkontribusi penuh dalam memberikan kebijakan mengenai investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri terhadap perusahaan nasional (BUMN) atau swasta untuk berfokus pada proses kegiatan usaha menggunakan tenaga manusia seperti infrastruktur dan megaprojek di Provinsi DIY.
3. Pemerintah diharapkan mampu memaksimalkan produktivitas tenaga kerja yang bertujuan guna menekan angka pengangguran, salah satunya dengan memberikan pelatihan supaya dapat meningkatkan skill atau kemampuan bagi pekerja di Indonesia, selain itu diharapkan pemerintah dapat meningkatkan modal usaha yang beredar di masyarakat sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan ikut serta dalam kontribusi perekonomian.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu memanfaatkan sampel penelitian yang lebih terperinci dalam suatu wilayah dan data penelitian dalam rentang waktu yang lebih panjang agar bisa diselaraskan dengan keadaan perekonomian daerah sekitar.